



**PEMERINTAH KOTA SOLOK**

# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
KOTA SOLOK  
TAHUN 2024**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 tahun 2006 yang diatur kemudian dalam peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP ( Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) dan secara teknis diatur dalam Permenpan Reformasi Birokrasi No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu media pertanggungjawaban yang sistematis dan dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan aparatur pada Organisasi Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta menggambarkan kemajuan dan evaluasi kinerja secara transparan setiap kebijakan dan pengambilan keputusan yang mengacu pada sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu program pembangunan Nasional program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia disamping pendidikan dan kesehatan. DPPKB turut memperkuat pelaksanaan pembangunan kependudukan dengan upaya mengendalikan kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk melalui pembangunan keluarga.

Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai peran yang sangat strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan dan melaksanakan sebagian kewenangan daerah di Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dalam mendukung pencapaian misi kepala Daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui peningkatan kualitas, kuantitas pelayanan KB dan Pembangunan Keluarga. Pembangunan keluarga tidak hanya terfokus pada masalah kependudukan dan KB namun dimulai dari rencana berkeluarga yang baik melalui program BKB untuk menurunkan angka stunting, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi Remaja (PKBR) yang berdampak pada pendewasaan usia perkawinan dalam mewujudkan keluarga berkualitas. Meletakkan keluarga sebagai sasaran pembangunan, adalah bentuk keberpihakan pemerintah yang menjadikan keluarga sebagai crosscutting issue bagi seluruh sektor terutama keluarga yang memiliki kategori prasejahtera.

## 1.2. Gambaran Umum

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai peranan penting dalam menjaga angka pertumbuhan penduduk, karena angka pertumbuhan ini secara langsung akan berkaitan dengan kualitas penduduk. Pertambahan penduduk yang tinggi secara umum akan memberikan dampak negatif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk yang besar akan membutuhkan kecukupan pangan, sandang dan papan yang lebih besar dibandingkan jumlah penduduk yang sedikit. Demikian juga kebutuhan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, rekreasi dan kebutuhan lainnya.

Disamping kuantitas penduduk keberadaan DPPKB juga pembangunan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2021 BKKBN ditunjuk sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting. Permasalahan stunting merupakan salah satu bagian dari Double Burden Malnutrition (DEM) mempunyai dampak yang sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi. Dalam jangka pendek anak stunting mengalami gangguan perkembangan sel otak yang akhirnya akan menyebabkan tingkat kecerdasan menjadi tidak optimal. Hal ini berarti bahwa kemampuan kognitif anak dalam jangka panjang akan lebih rendah dan akhirnya menurunkan produktivitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting yaitu:

1. Kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk serta persebaran penduduk.
2. Kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan dan angka kemiskinan.
3. Mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah antara perkotaan dan perdesaan.
4. Data dan Informasi penduduk
5. Penyerasian kebijakan kependudukan

Keluarga berkualitas sangat dipengaruhi kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, kemandirian keluarga, dan spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera. Upaya yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dalam meningkatkan

kualitas keluarga dengan pembangunan keluarga melalui program ketahanan keluarga sehingga delapan fungsi keluarga dapat terwujud.

Program bangga kencana merupakan pembangunan Sumber Daya Manusia di hulu yang akan memberikan dampak bagi terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, kompetitif dan maju. Untuk itu keluarga menjadi institusi yang sentral dan penting untuk kita berikan penguatan dan pemberdayaan.

Dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, berkualitas dan berdaya saing dapat dilakukan berbagai upaya antara lain : Memperkuat akses pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang merata dan berkualitas, Peningkatan pembinaan peserta KB baik menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) maupun non MKJP dengan memperhatikan efektivitas dan kelayakan medis hak reproduksinya, Meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga serta penguatan tata kelola penelitian dan pengembangan bidang keluarga berencana untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan efektivitas pembangunan kependudukan dan KB.

Berdasarkan permasalahan pokok dan isu-isu strategis Kota dan mengacu pada Visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait dengan misi Kepala Daerah yang ke 3 (tiga) yaitu Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan derajat kesehatan , pendidikan dan perlindungan sosial . Disamping mengendalikan jumlah penduduk secara kuantitas, DPPKB juga lebih fokus pada Pembangunan Keluarga dan percepatan penurunan stunting yang merupakan program nasional dan membutuhkan penanganan yang serius, yang berawal dari pembinaan PKBR( Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja), Bina Keluarga yang mempunyai Balita, pengembangan kelompok UPPKA/UPPKS melalui program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat

### **1.3.Aspek Strategis Organisasi (Isu Strategis)**

Isu strategis dirumuskan dengan cara menggali dan mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu global, nasional, dan lokal sehingga isu strategis akan menjadi salah satu dasar penentuan prioritas pembangunan dalam kurun waktu 5(lima) tahun mendatang.

Isu-isu strategis pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk
  1. Belum Optimalnya pengembangan Sekolah Siaga Kependudukan
  2. Belum optimalnya pengembangan kampung KB
  3. Belum optimalnya advokasi dan KIE program bangga kencana
- b. Permasalahan terkait Keluarga Berencana
  1. Masih tingginya unmetneed
  2. Masih rendahnya partisipasi pria dalam ber KB
  3. Masih tingginya DO (Drop Out)
- c. Permasalahan terkait Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  1. Belum optimal pembinaan kelompok Tribina , UPPKA dan PIK-R
  2. Belum optimalnya peningkatan ekonomi pada kelompok UPPKS
  3. Belum optimalnya pendidikan kesehatan reproduksi remaja jalur sekolah
  4. Belum optimal penanganan kasus stunting di Kota Solok

#### **1.4. Penghargaan**

Peningkatan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi yang semakin baik dari tahun sebelumnya dapat dibuktikan dari penghargaan tingkat Nasional dan Provinsi yang diperoleh oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2023 ini yaitu:

1. Terbaik I Kelompok BKB terbaik kategori Kota Tingkat Provinsi Sumatera Barat .
2. Terbaik I Tenaga Lini Lapangan Terbaik (KB Lestari) Tk Provinsi Sumatera Barat An. Nurul Mukhlis/Elma Yusri
3. Terbaik III Tenaga Lini Lapangan Terbaik (PKB PNS) Tk Provinsi Sumatera Barat An. Diana Ashar
4. Harapan I Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tim Pendamping Keluarga terbaik atasi Stunting.
5. Terbaik Kelompok KB Pria Perkasa Tk Provinsi Sumatera Barat
6. Terbaik kader BKB terbaik kelas orang tua hebat (Kerabat) An. Santi Hastuti

## **1.5.Kewenangan dan Data Umum Organisasi**

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Solok Merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur penunjang pelaksanaan tugas Walikota dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga beremcana
  - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola pelaksanaan administrasi dab mengelola pelaksanaan administrasi persuratan , kerumahtanggaan, protokoler, kehumasan, administrasi barang/asset, administrasi kepegawaian, akutansi dan administrasi keuangan.
3. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan adminstrasi umum dan kepegawaian
4. Sub bagian program dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan dan melaksanakan akutansi dan administrasi keuangan
5. Bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan mempunyai tugas menyiapkan kebijakanteknis,norma, standar, prosedur dan kriteria sertamerumuskan pelaksanaan kegiatan dibidang pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakan.

6. Fungsional Sub substansi advokasi dan pergerakan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan pergerakan
7. Fungsional sub substansi penyuluhan dan pendayagunaan penyuluh lapangan Keluarga Berencana dan kader Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan kegiatan di bidang penyuluhan dan pendayagunaan penyuluh lapangan Keluarga berencana dan kader keluarga berencana
8. Fungsional sub substansi Pengendalian Penduduk dan informasi keluarga mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga
9. Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis ,norma,standar prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan ber KB jalur pemerintah dan swasta dan merumuskan pelaksanaan kegiatan di bidang Keluarga Berencana
10. Fungsional sub substansi Pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan kegiatan di bidang pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi
11. Fungsional sub substansi Jaminan pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan kegiatan di bidang jaminan pelayanan KB
12. Fungsional sub substansi Pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan kegiatan di bidang pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB
13. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha dan lembaga ekonomi tepat guna serta pengembangan kelembagaan masyarakat
14. Fungsional sub substansi pemberdayaan keluarga sejahtera mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan kegiatan di bidang pemberdayaan keluarga
15. Fungsional sub substansi Bina ketahanan keluarga , balita , Anak dan Lansia mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan kegiatan di bidang Bina ketahanan keluarga , balita, anak dan lansia
16. Fungsional sub substansi Bina ketahanan remaja mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan kegiatan di bidang bina ketahanan keluarga dan remaja.

## Data Umum

Berdasarkan data keadaan Bulan Desember 2022, jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok berjumlah sebanyak 42 orang dengan komposisi seperti tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Kota Solok**

No	Jenis Pegawai	Jumlah	Satuan
1.	PNS	31	orang
2.	Penyuluh KB/PKB	13	orang
3.	Honor/Kontrak/Sukarela	11	orang
	Jumlah	55	orang

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Kota Solok berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Jumlah	Satuan
1.	Golongan IV	7	Orang
2.	Golongan III	35	orang
3.	Golongan II	2	orang
	Jumlah	44	orang

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Kota Solok berdasarkan Jabatan**

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah	Satuan
1.	Eselon II.b	1	orang
2.	Eselon III.a	1	orang
3.	Eselon III.b	2	orang



4.	Eselon IV.a	2	orang
5.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda	7	orang
6.	Penyuluh Lapangan KB (PKB)	13	orang
	Jumlah	26	orang

**Tabel 2.4**

**Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana  
Kota Solok Berdasarkan Pendidikan**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Satuan
1.	S2	6	orang
2.	S1	40	orang
3.	D3	8	orang
4.	SLTA	1	orang
	Jumlah	42	orang

### 1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Solok Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- Bab I, Pendahuluan**, yang berisikan gambaran umum, kewenangan dan Data Umum Organisasi serta Sistematika Penulisan.
- Bab II, Perencanaan Strategis**, yang menggambarkan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja pada tahun 2023
- Bab III, Akuntabilitas Kinerja**, bab ini merupakan inti dari laporan ini yang menyajikan gambaran capaian indikator kinerja, capaian kinerja sasaran tahun 2023 dan Akuntabilitas Keuangan.
- Bab IV, Penutup** yang berisikan Kesimpulan dan Saran dari Dokumen Laporan Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Solok Tahun 2023

## LAMPIRAN

1. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

## **BAB II**

### **PERENCANAAN STRATEGIS**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat dan mengacu kepada RPJPD Kota Solok 2005 -2025, maka dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026 ditetapkan visi Walikota dan Wakil Walikota Solok periode 2021-2026 yaitu

***“Terwujudnya Kota Solok Yang diberkahi Maju dan Sejahtera Melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Modern”***

Untuk mewujudkan Visi diatas, keberadaan OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung misi ke 3 kepala Daerah yaitu:

**“Peningkatan kualitas Hidup Masyarakat dengan Meningkatkan Derajat Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial”**

##### **2.1.1 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

###### **Tujuan**

Dari visi dan misi yang telah dirumuskan maka tujuan yang akan dicapai di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah **“Terwujudnya Keluarga Kecil Berkualitas”**

###### **Sasaran**

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok sampai tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Ketahanan Keluarga
2. Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 untuk mencapai sasaran diatas adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Meningkatkan Ketahanan Keluarga	Pembinaan Keluarga Berencana	Pelaksanaan advokasi, komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa, cetak dan elektronik serta media luar ruang Rp. 149.992.800</li> <li>2. Pelaksanaan mekanisme operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya Rp. 26.000.000</li> <li>3. Advokasi Program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja Rp. 80.000.000</li> <li>4. Pengendalian program KKBPK Rp. 28.875.000</li> </ol>
		Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Sarana Kolompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PI K-R, dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Rp. 428.884.000</li> <li>2. Orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PI K-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Rp. 30.282.900</li> <li>3. Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader)</li> </ol>

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PI K-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS Rp. 352.800.000
				4.Penyediaan biaya operasional bagi Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PI K-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS Rp500.782.700
			Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah/Kabupaten Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1. Penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PI K-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Rp. 57.116.800
				2.Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PI K-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS Rp. 76.036.000
				3.Pelaksanaan Peningkatan

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				<p>kapasitas Mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PI K-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS Rp. 127.758.000</p> <p>4. Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja Rp. 0</p>
	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Pengendalian Penduduk	<p>Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerahProvinsi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk</p> <p>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten Kota</p>	<p>1. Dukungan pelaksanaan survey pendataan Indeks Pembangunan berwawasan kependudukan Rp, 27.021.700</p> <p>2. Penyediaan dan pengembangan materi Pendidikan Kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal Kabupaten Kota Rp, 0</p> <p>1. Penyediaan dan pengolahan data kependudukan Rp. 22.340.000</p> <p>2. Pembinaan dan Pengawasan Sistem Informasi Keluarga Rp. 64.924.300</p> <p>3. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Rp.7.800.000</p> <p>4. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan PelayananKB Rp. 22.280.000</p>
		Pembinaan	Pelaksanaan advokasi,	1. Komunikasi, Informasi

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Keluarga Berencana (KB)	komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	<p>dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal Rp. 27.693.000</p> <p>2. Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK Rp. 131.900.202</p> <p>3. Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK Rp. 131.900.202</p>
			Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	<p>1. Penguatan pelaksanaan penyuluhan pergerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana /Penyuluh lapangan KB (PKB/PLKB) Rp. 9.513.000</p> <p>2. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Rp. 49.439.000</p>
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/kota	<p>1. Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya Rp. 33.064.200</p> <p>2. Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Rp. 420.575.500</p> <p>3. Pembinaan pasca pelayanan bagi peserta KB Rp. 30.225.220</p> <p>4. Promosi dan konseling kesehatan reproduksi serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan</p>

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				kelompok kegiatan Rp. 0
				5. Pembinaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya Rp20.700.000
			Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	1. Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan dan pembinaan kesertaan ber-KB Rp. 48.709.800
				2. Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di Kampung KB Rp55.499.700

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kesepakatan kinerja. Perjanjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Instansi yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan.

Adapun Rencana Target yang ingin dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Satuan
1	Meningkatkan Ketahanan Keluarga	Persentase iBangga	57.22	%
		Menurunnya kelahiran pada usia 15-19 Tahun (ASFR)	11.5	%



		Persentase baduta stunting	11.70	%
3	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Persentase TFR	2.17	%
		Persentase angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 Tahun	71.	%
		Persentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need)	10.	%

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. EVALUASI ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam mendukung pencapaian Misi ke III Kepala Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dispenduk – KB) menetapkan tujuan Terwujudnya Keluarga Kecil Berkualitas yang diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja 2023 (%)
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	57,22	65,05	113,68
2	Total Fertility Rate (TFR)	Rasio	2.17	1,85	134.59

##### I. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

iBangga merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga.

Penghitungan iBangga menggunakan pendekatan tiga dimensi yang dibentuk dengan 17 variabel diperoleh dari hasil Pemutakhiran data Keluarga 2023 dengan Realisasi 65,05 (Kategori berkembang) dari target 57,22 capaian kinerja 113,68 % . Capaian nilai iBangga Kota Solok berdasarkan hasil Rekap BKKBN Pusat sebagai berikut:

No	Dimensi	Variabel	Nilai
1	Ketentraman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki Jamkesmas</li> <li>- Memiliki Akte kelahiran</li> <li>- Memiliki Akte Nikah</li> <li>- Tidak Mengalami cerai Hidup</li> <li>- Menjalankan Ibadah</li> <li>- Tidak terdapat konflik</li> </ul>	64.75
2	Kemandirian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki tabungan</li> <li>- Akses media online</li> <li>- Tidak ada putus sekolah</li> <li>- Tinggal dalam rumah layak Huni</li> <li>- Tidak terdapat ART ada yang sakit</li> </ul>	57.62

No	Dimensi	Variabel	Nilai
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki sumber penghasilan</li> <li>- Makan makanan beragam</li> </ul>	
3	Kebahagiaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekreasi keluarga</li> <li>- Keikutsertaan dalam kegiatan sosial</li> <li>- Pengasuhan bersama oleh suami istri</li> <li>- Interaksi antar anggota keluarga</li> </ul>	72.78

Jika dibandingkan dengan realisasi iBangga tahun 2022 sebesar 57,84 dengan Capaian 103.79% terjadi peningkatan kinerja 9,89%. Untuk Tingkat Provinsi Sumatera Barat Kota Solok peringkat 3 setelah Kota Padang Panjang dan Kota Paya Kumbuh. Jika Dibandingkan dengan target jangka menengah berdasarkan Renstra dan RPJMD capaian iBangga tahun 2023 telah melebihi dari Target Tahun 2026 yaitu sebesar 63,46. Angka indeks pembangunan keluarga (iBangga) tingkat Provinsi Sumatera Barat sebesar 60,99 dan secara Nasional pada tahun 2023 sebesar 61.43

Tercapainya iBangga menunjukkan adanya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan rasa aman, tentram dan bahagia dengan menjalankan delapan fungsi keluarga yaitu fungsi agama, fungsi perlindungan, fungsi cinta kasih, fungsi sosialisasi pendidikan, fungsi Sosial budaya, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi dan fungsi lingkungan.

Faktor pendukung capaian iBangga melebihi target yaitu:

1. Dukungan Pemerintah Kota Solok sudah maksimal untuk pemenuhan 3 dimensi penilaian iBangga.
2. Masyarakat Kota Solok memiliki akses yang mudah terjangkau untuk mendapatkan pelayanan
3. Komitmen Pemerintah Kota beserta pihak terkait dalam memaksimalkan pelaksanaan Program Bangga Kencana
4. Sinergitas yang baik dengan mitra kerja, sehingga pelaksanaan program lebih maksimal

## II. Total Fertility Rate (TFR)

Angka kelahiran Total (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15 -49 tahun). TFR dihitung dari penjumlahan ASFR per kelompok umur terealisasi tahun 2023 sebesar 1,85 dengan capaian kinerja 134,59 %.

Penduduk tumbuh seimbang terwujud saat TFR mencapai 2,1. Untuk TFR dibawah 2,1 maka arah kebijakan kependudukannya tidak lagi untuk menurunkan pertumbuhan penduduk. TFR yang sangat rendah dapat memperpendek selang waktu terjadinya bonus demografi. Dengan TFR rendah fokus pembangunan kependudukan harus diarahkan pada peningkatan kualitas SDM dan peningkatan kualitas pelayanan dasar agar cita-cita untuk mencapai kualitas SDM unggul dapat terwujud.

Capaian TFR pada tahun 2023 sebesar 1,85 dari target 2,17 dengan capaian kinerja sebesar 134,59%. Jika dibandingkan capaian pada tahun 2022 sebesar 2,17 terjadi penurunan TFR secara drastis dengan peningkatan capaian kinerja 33,67%. Pada tahun 2021 sebesar 2,16 dan untuk target akhir RPJMD 2021-2026 dan Renstra DPPKB sebesar 2,14, maka capaian TFR Tahun 2023 telah jauh dibawah target yang ditetapkan. Capaian TFR Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 2,18 dan Secara Nasional realisasi TFR sebesar 2,14. Untuk tahun 2022 TFR Nasional sebesar 2,14. Capaian TFR ini merupakan indikator keberhasilan dari pelaksanaan program pengendalian Penduduk dan Pembinaan Keluarga Berencana.

Manfaat tercapainya TFR untuk Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Angka TFR merupakan ukuran dari pengendalian pertumbuhan penduduk. Dengan jumlah penduduk yang tumbuh terkendali pemerintah mengalokasikan program dan anggaran untuk peningkatan kualitas seperti peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, perluasan lapangan kerja dan program lainnya yang dapat meningkatkan daya saing dan SDM.
2. Merupakan penunjang pencapaian bonus demografi dengan terwujudnya SDM yang berkualitas yang berdampak pada tenaga kerja produktif sehingga dapat mendorong kesejahteraan masyarakat,
3. Menurunnya angka TFR merupakan faktor penting dalam menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi, menghindari kehamilan yang tidak diinginkan sehingga diharapkan dapat berdampak positif pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Analisis penyebab keberhasilan penurunan TFR antara lain:

1. Kepedulian masyarakat terhadap program bangsa kencana terutama terkait penggunaan alat kontrasepsi modern sudah tinggi, hal ini ditandai dengan perubahan perilaku yang signifikan di masyarakat.

2. KIE program bangga kencana telah menyasar di seluruh kalangan masyarakat yang ditandai dengan capaian ASFR (11.17), MUKP (23,7Tahun), ( , Unmetneed (6,7 ,terendah di Sumbar), PA MKJP (49 % peringkat 2 di Sumbar),mCPR (65,1%, tertinngi di Sumbar)

Analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan penurunan TFR

Semua program , kegiatan dan sub kegiatan pada program Pembinaan Keluarga Berencana dan Program Pengendalian Penduduk akan berdampak terhadap pencapaian TFR.

Dalam mencapai tujuan Terwujudnya keluarga kecil Berkualitas dilaksanakan melalui 2 (dua) sasaran dengan 4 Program , 15 kegiatan , dan 47 Sub Kegiatan dengan analisis Capaian indikator sasaran sebagai berikut :

### Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja

#### Sasaran I : Meningkatkan Ketahanan Keluarga

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Menurunnya kelahiran pada usia 15 – 19 Tahun ( ASFR)	%	12	13.35	79.78	11.5	11.17	101,1
2	Persentase Baduta Stunting	%	12,1	12,1	100	11,7	10,73	118,08

Pada tahun 2022 untuk sasaran Meningkatkan Ketahanan Keluarga melalui program Pembinaan Keluarga Berencana dan program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga . Selain Pembinaan terhadap remaja, pembinaan terhadap kelompok tribina dan UPPKA, juga dititikberatkan pada kegiatan penanganan kasus stunting yang merupakan program nasional.Capaian sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan gambaran sebagai berikut :

## **1. Persentase menurunnya kelahiran pada usia remaja ( 15 -19 ) (ASFR),**

ASFR (Age Specific Fertility Rate) adalah banyaknya kelahiran dari perempuan pada suatu kelompok umur tertentu (15-49 tahun) pada suatu tahun tertentu per 1.000 perempuan pada kelompok umur dan pertengahan tahun yang sama. Capaian Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun) Kota Solok di Tahun 2023 adalah sebesar 11,17 artinya di tahun 2023 terdapat 11 sampai dengan 12 kelahiran per 1.000 wanita pada usia 15- 19 tahun. Secara umum jika kita membandingkan antara capaian ASFR tahun 2023 dengan target Renstra sebesar 11,5 mengalami progress positif dengan meningkatnya capaian kinerja, sehingga dapat diasumsikan remaja di Kota Solok sudah mulai mengerti bahaya kehamilan di usia remaja (pernikahan dini) perlu dipertimbangkan secara matang, dan dapat dikatakan bahwa program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) di Kota Solok berhasil. Kalau kita bandingkan dengan capaian ASFR pada tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan sebesar 14,91%, yakni dari 13,35 tahun 2022 menjadi 11,16 pada tahun 2023.

Salah satu faktor yang mempengaruhi status kesehatan anak adalah status umur saat hamil dan bersalin pada seorang ibu. Kehamilan dan persalinan pada usia muda merupakan kehamilan yang berisiko, diantaranya dapat mengakibatkan kematian ibu, kematian bayi/anak, dan kekurangan gizi pada bayi/anak. Apabila kekurangan gizi berlangsung lama pada janin dan bayi sampai dengan usia anak dua tahun, maka akan terjadi stunting. Indikator untuk mengukur banyaknya kelahiran hidup per 1.000 wanita pada kelompok umur muda ini dapat dilihat melalui Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun

Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, pada tahun 2023, capaian angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) sebesar 11. artinya terdapat 11 kelahiran per 1.000 wanita pada usia 15- 19 tahun. Sehingga data dapat disimpulkan bahwa capaian ASFR Kota Solok hampir sama dengan Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan pencapaian indikator ASFR nasional tahun 2023 sebesar 22,8 sehingga pencapaian Kota Solok lebih baik dari nasional.

Capaian kinerja penurunan ASFR 15-19 tahun di Tahun 2023 adalah sebesar 11,16 dan belum mencapai target akhir renstra yakni sebesar 10.

### **• Analisis keberhasilan**

Keberhasilan dalam mencapai target kinerja penurunan ASFR 15-19 tahun didukung oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Sasaran KIE Bangga Kencana yang menyasar kelompok pasangan usia muda masih telah menggunakan pendekatan kekinian. Model KIE dan media yang digunakan telah mengembangkan media-media interaktif dan media sosial. Hal tersebut sesuai dengan gaya hidup pasangan muda era saat ini yang lebih menyukai media sosial dibandingkan media lainnya, dan lebih menyukai model penyampaian informasi yang interaktif berupa video / media tiga dimensi dibandingkan dengan membaca tulisan.
- b. Sasaran penggerakan pelayanan KB bagi pasangan usia subur muda telah menyasar sasaran muda dengan tepat dan terencana dengan baik. Pelayanan KB telah dilakukan dengan membuat skala prioritas / urgensi pelayanan KB. Kelompok usia muda / remaja menjadi prioritas utama untuk ber-KB. Metode penggerakan KB yang demikian berpotensi membuat ASFR 15-19 tahun turun.

**• Hal-hal yang sudah diupayakan**

Upaya-upaya telah dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok untuk mengejar target penurunan ASFR 15-19 tahun yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja antara lain:

- a. Melaksanakan proyek prioritas nasional peningkatan pengetahuan remaja putri sebagai calon ibu tentang edukasi kespro dan gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR). Sasaran kegiatan ini adalah kelompok PIK-R dan BKR. Tujuannya adalah agar remaja putri memiliki bekal yang cukup tentang kesehatan reproduksi, pengetahuan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu, risiko kehamilan remaja, dan lain sebagainya. Bentuk kegiatan adalah optimalisasi peran poktan-poktan di lini lapangan agar lebih aktif memberikan edukasi.
- b. Sosialisasi Modul PKBR melalui Kelompok PIK R dan BKR. Modul yang dikembangkan untuk memfasilitasi kelompok kegiatan PIK-R sebanyak 21 kelompok dan BKR sebanyak 22 kelompok,
- c. Sosialisasi PKBR melalui media sosial, agar para remaja memahami proses perencanaan yang baik dalam berkeluarga.
- d. Promosi pendewasaan usia perkawinan (meningkatkan usia kawin pertama perempuan) yang dilakukan melalui program Generasi Berencana (GenRe).

- e. Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal dengan cara peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga

• **Efisiensi sumber daya yang ada**

Upaya dan pengalokasian sumber daya untuk mencapai target penurunan ASFR 15-19 tahun seperti yang sudah ditetapkan memperhatikan prinsip efisiensi pelaksanaan kegiatan, antara lain: jumlah personil komponen pelaksana yang terbatas dalam melaksanakan program-program yang berkaitan dengan remaja yang memiliki target kinerja cukup besar. Keterbatasan tersebut dapat dimaksimalkan dengan tenaga yang ada sehingga target kinerja penurunan ASFR 15-19 tahun dapat tercapai.

• **Manfaat kinerja bagi masyarakat**

Indikator kinerja penurunan ASFR 15-19 tahun memberikan manfaat kepada masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut:

- Masyarakat yang memiliki anak remaja dapat memperoleh sumber informasi dan edukasi tentang pengasuhan remaja yang baik melalui kelompok BKR.
- Remaja usia sekolah dapat memperoleh informasi tentang risiko kehamilan di masa remaja melalui kelompok kegiatan PIK-R di sekolahnya atau lingkungan sekitarnya.
- Penurunan ASFR nantinya juga berdampak kepada penurunan prevalensi stunting.

Dalam melakukan penilaian capaian kinerja dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

d.

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

e. Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



**Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Menurunnya kelahiran pada usia 15 – 19 Tahun**

**( ASFR)**

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja**

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2022	Tahun 2023			Kriteria Penilaian Realisasi
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	6	5	6	7	8
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pembayaran Jasa Kader BKR	Orang	100	528 org	528 orang	100	Sangat baik
		Persentase Keluarga yang Aktif dalam Kelompok Kegiatan (Tribina, UPPKA)	Persen	103,09	78.25	78.5	100,32	Sangat baik Tinggi
		Persentase Tenaga Teknis yang Terampil	Persen	100	58	60	113,23	Sangat baik Tinggi
		Jumlah organisasi yang mengikuti pelaksanaan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL)	Persen	100	21	21	100	Sangat baik
		Persentase keluarga yang menjadi anggota kelompok tribina dan UPPKA	Persen	103,9	46.67	50	107,14	Sangat Baik
		Persentase tenaga teknis yang terampil	Persen	100	53	60	113,21	Sangat baik

Dari Tabel diatas tergambar semua capaian indicator kinerja dengan kriteria penilaian sangat baik semua sub kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini telah dilaksanakan dengan maksimal

## **2,Persentase Baduta Stunting**

Stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gangguan pertumbuhan pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang. Kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Penurunan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang anak. Stunting mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Hal ini berisiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa. Stunting juga menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit. Anak stunting berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Bahkan, stunting dan berbagai bentuk masalah gizi diperkirakan berkontribusi pada hilangnya 2%- 3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

Melihat dampak yang ditimbulkan dari permasalahan stunting, maka diperlukan penanganan stunting secara serius dan terpadu. Sinergisitas pemerintah, dunia usaha, Perguruan Tinggi, Lembaga Masyarakat, dan media massa baik cetak maupun elektronik sangat dibutuhkan dalam penanganan stunting dalam rangka mempercepat penurunan angka stunting di Kota Solok. Program ini harus melibatkan berbagai pihak yang dinilai efektif untuk membantu perubahan perilaku masyarakat. Kesadaran masyarakat yang tinggi dapat terjadi, apabila masyarakat diberikan edukasi dan pemahaman tentang faktor-faktor risiko penyebab terjadinya stunting. Selain itu, TPPS yang sudah terbentuk harus bekerja secara konvergensi mulai dari tingkat Kota, tingkat Kecamatan, bahkan sampai ke tingkat Kelurahan.

Realisasi persentase Baduta stunting berdasarkan data RPJMN dan Renstra di Sigizi terpadu dilaporkan/diinput setiap bulannya, dimana pada TW I untuk Kota Solok persentase Baduta Stunting (0-23 bulan) sebesar (13,9%) sebanyak 153 orang, Wasting sebesar (5,9%), dan Ibu hamil KEK sebesar (10,8%), untuk IKG data balita mendapat vit. A sebesar (76,8%) bumil mendapatkan TTD sebesar (71%) dan bumil minum TTD sebesar (64,59%), Asi Eksklusif < 6 bulan sebesar (49,1%), D/S sebesar (52,1%) serta BBLR sebesar (5,6%).

Sedangkan pada TW II hasil penimbangan bulan Desember 2023 presentase Baduta Stunting (0-23 bulan) turun (7.84%) sebanyak 104 orang, Wasting sebesar (2.49%), ini menunjukkan bahwa intervensi sensitive dan spesifik yang dilakukan OPD dalam aksi konvergensi untuk percepatan penurunan stunting sudah ada, salah satunya terlihat peran

OPD dalam program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT).

Terhitung bulan Desember 2023 OPD yang sudah menyelesaikan tugasnya sebagai Bapak Asuh Anak Stunting tahap I yaitu ada sebanyak 48 Baduta, yang terdiri dari 37 Baduta sudah selesai diserahkan oleh OPD, sedangkan 11 Baduta lagi dalam proses pemberian, untuk bantuan Bapak Asuh Anak Stunting Tahap II ada 8 orang Baduta yang sedang diajukan yang akan diberikan bantuan oleh OPD.

Kota Solok berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) pada Tahun 2022 baru berhasil menurunkan Angka Prevalensi sebesar 0,4 Persen yakni dari 18,5 Persen tahun 2021 menjadi 18,1 persen pada tahun 2022. Target Penurunan Angka Prevalensi sebesar 0,4 Persen belum berhasil diwujudkan, sehingga untuk mencapai target penurunan pada angka 18,1 Persen pada Level Provinsi harus menurunkan Prevalensi sebesar 6,52 Persen dan target tahun 2024 sebesar 17,07%. Bagaimana hasil Survey SSGI Tahun 2023 kita tunggu hasilnya awal bulan depan.

Jika dibandingkan dengan target capaian Persentase Baduta Stunting pada akhir Rentra sebesar 10,5 %, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana optimis dapat terwujud. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut, sudah dicanangkan di tingkat Kota “Solok Bebas Stunting”. Gerakan Bebas Stunting ini dimulai dari kelurahan. Peran aktif TPPS kelurahan harus didorong secara optimal dalam rangka mempercepat pencegahan dan penanganan stunting melalui pemanfaatan dana OPD dalam 8 aksi konvergensi. jika semua kelurahan mencanangkan Solok Bebas Stunting, maka percepatan penurunan prevalensi akan terjadi secara signifikan.

Harapannya dengan bekerja secara konvergensi, maka data stunting dapat diperoleh secara utuh dan terpadu. Tidak dapat dipungkiri dengan adanya data nama dan alamat (by name by adress/BNBA) penderita stunting secara rinci, maka program kegiatan yang dijalankan tepat sasaran. Bentuk intervensi dan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting, intervensi spesifik dan intervensi sensitif, serta memberikan penyuluhan secara terus menerus kepada masyarakat luas diharapkan angka kasus stunting di Kota Solok pada tahun 2024 dapat terwujud di bawah 10%.

Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja antara lain:

1. Diterbitkan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting Kota Solok.

Dalam rangka optimalisasi pencegahan *Stunting* dan penurunan prevalensi *Stunting* di Kota Solok secara efisien dan efektif telah dibuat peraturan tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Ruang lingkup dari Perwako ini adalah

- Penguatan Perencanaan dan Penganggaran meliputi : Sasaran, Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*, Pilar Percepatan Penurunan *Stunting*, Pola Pendekatan Percepatan Penurunan *Stunting*, Koordinasi Lintas Sektor, Penganggaran
- Peningkatan Kualitas Pelaksanaan meliputi : Peran Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Intervensi Spesifik dan Sensitif, Kampanye Publik dan Kampanye Perubahan Perilaku
- Peningkatan Kualitas Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan meliputi Skema Insentif Pelaku Penurunan Prevalensi *Stunting* Kelurahan
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
- Peran Serta Masyarakat meliputi Peran Kelembagaan Masyarakat di Kelurahan

2. Pembentukan TPPS Tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Tim Pendamping Keluarga.

Tim Percepatan Penurunan *Stunting* selanjutnya disingkat TPPS adalah Tim yang bertugas melakukan pengendalian, penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* dan dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia. TPPS bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di wilayahnya. TPPS terdiri dari Kota, Kecamatan dan Kelurahan karena percepatan penurunan *stunting* membutuhkan kolaborasi multi-pihak dan lintas sektor dan penguatan kelembagaan pengelolaan *stunting* dari level pemerintah kota, kecamatan, kelurahan dan lembaga non-pemerintah.

3. Penanganan Stunting dilakukan secara konvergensi dengan OPD terkait

Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting adalah Intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama. Ini dilakukan dengan mensasar kelompok sasaran prioritas yang tinggal di kelurahan untuk mencegah stunting. Penyelenggaraan intervensi, baik gizi spesifik maupun gizi sensitif secara konvergen dilakukan dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pencegahan stunting. untuk mendukung program pemerintah dalam penurunan angka stunting tersebut dapat juga dengan memperkuat kapasitas dalam Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting melalui intervensi Spesifik dan Sensitif oleh OPD terkait.

4. Adanya surat edaran Walikota Solok nomor 476/321/DPPKB/IV-2023 tentang Menggelorakan dan menghimbau mitra untuk menjadai BAAS. Pemberian BAAS melibatkan seluruh OPD serta berbagai pihak Pemangku Kepentingan antara lain: Forkopinda, KAN, Bundo Kanduang, PKK, Akademisi, BUMD/BUMN, Bank.

Program Bapak Asuh Anak Stunting dapat berperan strategis dalam mendukung upaya penurunan prevalensi stunting. Salah satu tugas Bapak Asuh Anak Stunting adalah memberikan bantuan makanan supaya gizi terpenuhi bagi keluarga berisiko tinggi stunting.

Hal ini sangat penting dikarenakan kondisi kurang gizi yang cukup lama menyebabkan stunting dan bisa dijadikan indikator bahwa di dalam rumah tangga konsumsi makanan bergizinya kurang adekuat.

Oleh karena itu, program Bapak Asuh Anak Stunting diharapkan dapat mendukung upaya pemenuhan gizi bagi keluarga berisiko tinggi stunting serta memperkuat program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang.

#### Efisiensi penggunaan Sumber Daya

- TPK

Tim Pendamping Keluarga merupakan sekelompok tenaga yang dibentuk dan terdiri dari Bidan, Kader TP PKK dan Kader KB untuk melaksanakan pendampingan

meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 bulan serta melakukan surveilans keluarga berisiko stunting untuk mendeteksi dini faktor-faktor risiko stunting.

TPK memperhatikan prinsip efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan pemberdayaan tenaga, pikiran, dan waktu, antara lain: jumlah personil komponen pelaksana yang terbatas dalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting.

Keterbatasan tersebut dapat dimaksimalkan dengan tenaga yang ada sehingga diharapkan target prevalensi stunting di Indonesia tahun 2024 sebesar 14% dapat tercapai.

Mengingat begitu besarnya tugas dan tanggung jawab Tim Pendamping Keluarga dalam rangka percepatan penurunan stunting di Indonesia, sudah selayaknya kita memberikan dukungan sepenuhnya agar tim ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik

- Keterbatasan dukungan APBD

Dalam menjalankan fungsinya, tim pendamping keluarga disupport oleh legalitas (SK), sarana prasana, anggaran dan dukungan moril. Ada beberapa hambatan yang menjadi kendala bagi tim pendamping keluarga diantaranya dukungan anggaran yang minim untuk peningkatan kapasitas TPK melalui pelatihan-pelatihan serta hambatan di server dan aplikasi Elsimil

### **Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Menurunnya Persentase Baduta Stunting**

Tabel 3.2 Capaian Kinerja

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2022	Tahun 2023			Kriteria Penilaian Realisasi
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	6	5	6	7	8
1.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Jumlah dokumen KIE bangsa kencana sesuai kearifan budaya lokal	Persen	100	2 Dok	2 Dok	100	Sangat Baik
		Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPK	Persen	100	12 Lap	12 Lap	100	Sangat Baik

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2022	Tahun 2023			Kriteria Penilaian Realisasi
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	6	5	6	7	8
		Jumlah organisasi yang mengikuti penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL)	Persen	100	3 organisasi	3 organisasi	100	Sangat baik i
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah kader yang mengikuti orientasi/ pelatihan teknis pelaksanaan/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PIKR,UPPKS)	Persen	103,75	227 orang	225 orang	100	Sangat baik
		Jumlah organisasi yang mendapat pendampingan dari stakeholders dan mitra kerja	Persen	100	13 Kel	13 Kel	100	Sangat Baik

Dari tabel diatas semua indikator kinerja yang mendukung pencapaian indikator sasaran dengan kriteria sangat baik, karena selain dana DAU dukungan DAK Non Fisik juga sangat membantu untuk pencapaian indicator sasaran ini.

**Sasaran : Mengendalikan pertumbuhan penduduk**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (mCPR)	%	70.5	71.63	101,6	71	70,48	99.27
2	Persentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need)	%	10.5	9,28	116,59	10	8,29	141.25

Cakupan indikator sasaran Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk diukur dengan dua indikator kinerja yaitu :

1. Persentase Pemakaian Kontrasepsi (mCPR)

CPR adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. Data CPR yang diperoleh dari angka Peserta KB Aktif (PA) dibanding jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) merupakan salah satu indikator kunci dalam pengukuran kinerja Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Pemakaian alat kontrasepsi (mCPR) merupakan wujud dari program Keluarga Berencana yang digunakan untuk menunda atau mencegah kehamilan dan mengatur jarak kelahiran. Kontrasepsi dibedakan menjadi dua jenis yaitu kontrasepsi modern dan kontrasepsi tradisional. Metode kontrasepsi modern memungkinkan pasangan untuk bertindak sesuai keinginan seksual dengan sedikit resiko terjadi kehamilan pada waktu yang tidak diinginkan. Metode kontrasepsi modern menyumbang lebih dari 90% dari penggunaan kontrasepsi di seluruh dunia.



Capaian mCPR merupakan muara dari capaian indikator persentase peserta KB baru dan persentase akseptor kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Oleh sebab itu walaupun kedua indikator ini menjadi indikator Daerah untuk OPD KB di dalam RPJMD, keduanya dijadikan indikator program pada renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2021-2026. Hal ini dapat kami gambarkan berdasarkan hasil pengolahan data New SIGA tahun 2023 sebagai berikut:

NO	BULAN	IUD	MOW	MOP	KDM	IMP	STK	PIL	MKJP	NON MKJP	JML
1	JAN	64	47	0	12	25	24	4	136	40	176
2	FEB	59	49	0	14	30	30	13	138	57	195
3	MARET	68	46	0	20	45	46	15	159	81	240
4	APR	61	65	0	5	10	31	5	136	41	177
5	MEI	43	49	0	38	36	27	37	128	102	230
6	JUN	66	34	0	58	55	15	60	155	133	288
7	JULI	50	43	1	25	27	26	27	121	78	199
8	AGT	74	57	1	19	42	40	17	174	76	250
9	SEP	87	58	0	41	55	19	44	200	104	304
10	OKT	54	57	1	57	37	27	57	149	141	290
11	NOV	62	36	1	47	36	31	80	135	158	293
12	DES	48	42	2	23	24	28	30	116	81	197
	JUMLAH	736	583	6	359	422	344	389	1747	1092	2839

Berdasarkan data diatas tergambar Capaian peserta KB Baru (PB) pada tahun 2023 sebanyak 2.839 akseptor dengan metode MKJP 1.747 akseptor dan non MKJP 1.02 akseptor. Target yang diberikan pada tahun 2023 untuk Peserta KB Baru adalah 2064 Akseptor dengan capaian servis point sebanyak 1.064 (37,48 %) dan domisili point sebanyak 1771 (62,92 %). Ini menurun dibandingkan tahun 2022 yaitu untuk servis point sebanyak 2446 (158,96%) dan untuk domisili point sebanyak 1414 (91,81%) dengan target 1540. Namun pada tahun 2021 pencapaian lebih rendah yaitu 1023 (74,72%) dengan target 1369.

Capaian mCPR tahun 2023 berdasarkan hasil pendataan New SIGA sebesar 70,48% yang berasal dari Jumlah akseptor 8.536 dengan PUS 12.111 orang. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 terjadi penurunan kinerja sebesar 2,33%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 telah dimanfaatkan hasil pendataan dari New SIGA yang dientri

berdasarkan NIK Akseptor sehingga akseptor yang ganti cara/metode kontrasepsi tidak bisa diinput menjadi akseptor KB Baru (PB) .

Jika dibandingkan Capaian PA 2021 sebesar 67,08% dan berdasarkan target akhir RPJMD sebesar 72,20. Dengan pemutakhiran data menggunakan aplikasi New SIGA hal ini akan sulit untuk diwujudkan karena menurut BKKBN pusat capaian mCPR 70% sudah memiliki capaian kinerja 100 %.

Berdasarkan Hasil pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2023 capaian mCPR Kota Solok 65,1% yang merupakan peringkat I Tingkat Kabupaten Kota di Sumatera Barat, capaian provinsi Sumatera Barat sebesar 56,65% dan secara Nasional 60,4 %. Perbedaan yang cukup tajam antara hasil pemutakhiran Pendataan Keluarga dengan hasil entri New SIGA disebabkan karena belum seluruh hasil pendataan Tahun 2022 diimigrasi ke hasil pendataan tahun 2023. Pemutakhiran data tahun 2023 hanya 8 Kelurahan.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk metode kontrasepsi modern adalah :

1. Adanya kerjasama dengan jejaring dan organisasi dalam pencarian akseptor KB melalui IPEKB, IBI, TNI, PKK,
2. Tersedianya pemenuhan kebutuhan Alokasi dan sarana penunjang Pelayanan KB melalui BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3. Peningkatan Kesertaan KB Pria dengan memberdayakan Kelompok KB Pria dalam mendukung KIE di lapangan
4. Adanya perjanjian kerja sama dengan Fasilitas kesehatan Pemerintah dan Swasta (MOU) dalam pelayanan KB MKJP

### **Analisis Penggunaan Sumber Daya**

1. Penyuluh Lapangan KB (PLKB)

PLKB merupakan pelaksana teknis fungsional dalam program KBPK dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bertugas melakukan pengelolaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga serta Keluarga Berencana yang memberikan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) dan memfasilitasi pelayanan KB.

2. Kader KB

Kader KB terdiri dari PPKBD sebanyak 13 orang dan sub PPKBD sebanyak 144 orang yang berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah (perpanjangan PLKB) dalam melaksanakan program Pengendalian Penduduk dan KB

3. Keterbatasan Dana APBD

Dalam pelaksanaan program kegiatan KB sangat didukung dari dana APBN (DAK Non Fisik) seperti;

- Pelayanan KB MKJP (Transpor Akseptor , jasa medis, Jasa KIE kader)
- Ketersediaan Alokasi sesuai kebutuhan

4. Akses pelayanan mudah dijangkau dengan dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai

**Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Persentase Pemakaian Kontrasepsi(mCPR)**

Tabel 3.3 Capaian Kinerja

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2022	Tahun 2023			Kriteria Penilaian Realisasi
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	6	5	6	7	8
1.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (kb)	Jumlah dokumen KIE bangsa kencana sesuai kearifan budaya lokal	Persen	100	2 Dok	2 Dok	100	Sangat baik
		Jumlah kader yang mengikuti pergerakan kader IMP	Persen	100	157 org	127 org	80,89	Tinggi
		Jumlah laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Faskes termasuk jaringan dan jejaringnya	Persen	100	12 lap	12 Lap	100	Sangat baik

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2022	Tahun 2023			Kriteria Penilaian Realisasi
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	6	5	6	7	8
		Jumlah orang yang mengikuti kesertaan metode kontrasepsi Jangka panjang	Persen	340	700 akp	553 akp	79	Tinggi
		Jumlah organisasi yang mendapatkan penguatan peraserta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	Persen	100	4 org	4 org	100	Sangat Baik
		Persentase tingkat putus pakai kontrasepsi (DO)	Persen	56,68	8,3	8.43	100	Sangat Baik

Dari table diatas 4 indikator dengan kriteria penilaian sangat baik, 2 indikator tinggi,

## 2. Persentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need)

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed) adalah persentase wanita 11 - 49 tahun (Pasangan Usia Subur) yang tidak ingin punya anak (TIAL) atau ingin menjarangkan kelahiran anak berikutnya (IAT) tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun

Pada tahun 2023 angka capaian unmeet need adalah 8,29 % menurun dibandingkan pada tahun 2022 yaitu 9,28 terjadi kenaikan kinerja sebesar 24,66% dan tahun 2021 yaitu 10,24. Berdasarkan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga tahun 2023 Capaian Unmed need Provinsi Sumatera Barat 16,1% dan capaian Nasional 11,5%. Angka unmeet need setiap tahun di Kota Solok menurun, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra dan RPJMD tahun 2026 sebesar 9,7%, capaian tahun 2023 telah melebihi dari target yang ditetapkan . hal ini karena akses layanan yang cukup baik dan tidak sulit, cukup baiknya informasi (KIE) yang

diterima oleh Pasangan Usia Subur (PUS) tentang Keluarga Berencana serta kualitas pelayanan yang baik.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian target Unmet need adalah :

1. Penguatan KIE interpersonal melalui konseling pada, ibu hamil dan ibu paska salin oleh tenaga kesehatan
2. Penyediaan materi KIE berorientasi pada perubahan perilaku sebagai bahan bagi tenaga lini lapangan dalam menyampaikan pesan kepada sasaran PUS Unmetneed
3. Memanfaatkan aplikasi silili keren untuk menyebarkan informasi (KIE) bagi PLKB, kader PPKBD dan Sub PPKBD.
4. Tersampainya pesan tentang fakta dan menepis mitos, serta pilihan alat/metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan calon akseptor

Analisis atas penggunaan sumber daya untuk capaian indikator Unmetneed sama dengan capaian indikator

**Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Persentase Persentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need)**

Tabel 3.3 Capaian Kinerja

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2022	Tahun 2023			Kriteria Penilaian Realisasi
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	6	5	6	7	8
1.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem informasi Keluarga	Persen	100	12 lap	12 lap	100	Sangat baik
		Jumlah dokumen penyediaan dan pengolahan data kependudukan	Persen	100	12 Dok	12 Dok	100	Sangat baik
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah dokumen KIE bangsa kencana sesuai kearifan budaya	Persen	100	2 dok	2 Dok	100	Sangat baik

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2022	Tahun 2023			Kriteria Penilaian Realisasi
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	6	5	6	7	8
		lokal						
		Jumlah organisasi yang mendapat advokasi program bangga kencana kepada stakeholders dan mitra kerja	Persen	133,29	13 Kel	13 Kel	100	Sangat baik
		Jumlah dokumen promosi dan KIE program bangga kencana melalui media cetak dan elektronik serta media luar ruang	Persen	100	3 dok	2 dok	66,67	sedang
		Meningkatnya Jumlah Tenaga Pengelola KB Yang Terampil	Persen	100	100%	100,9	100,9	Sangat baik
		Jumlah Kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana di Kampung KB	Persen	100	3 Kp	3 Kp	100	Sangat baik

Dari pengukuran 7 indikator kinerja diatas 6 indikator dengan kriteria sangat baik, hanya satu indikator dengan kriteria sedang yaitu Jumlah dokumen promosi dan KIE program bangga kencana melalui media cetak dan elektronik serta media luar ruang. Hal ini disebabkan jumlah alokasi DAK Non Fisik yang terlalu tinggi untuk biaya cetak Baliho dan Spanduk.

## B. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 6.772.531.900 (89.28 %) dari total anggaran yang dialokasikan yaitu Rp. 7.585.509.130 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.776.306.308</b>	<b>4.334.776.102</b>	<b>90.75</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>7.407.900</b>	<b>7.212.200</b>	<b>97,36</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.794.400	1.729.500	96,38
	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	1.011.500	960.500	94,96
	Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	871.400	835.400	95,87
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	3.730.600	3.686.800	98,83
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.897.084.484</b>	<b>3.535.723.825</b>	<b>90,72</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.895.953.584	3.534.629.025	90,73
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan/triwulan/semesteran SKPD	1.130.900	1.094.800	96,81
<b>3I</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>13.901.700</b>	<b>11.025.135</b>	<b>79.31</b>
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1.400.700	798.100	56,94
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	12.500.000	10.227.035	81,82
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>241.949.300</b>	<b>225.431.371</b>	<b>93.17</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.251.600	7.131.600	98,35
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	300.000	300.000	100
	Penyediaan Bahan Logistik	40.923.800	36.731.050	89,75
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.447.400	15.443.500	99,97
	Fasilitasi Kunjungan Tanu	7.112.500	2.585.000	36,34
	Peyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	<b>168.594.000</b>	<b>160.920.221</b>	<b>95.45</b>
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>117,595,000</b>	<b>117,204,550</b>	<b>99.7</b>
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	7.800.000	7.800.000	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
1	2	3	4	5
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5,400,919,515</b>	<b>5,176,163,513</b>	<b>95,8</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	560.000	560.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.947.924	59.239.313	76,99
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	252.570.000	251.770.000	99,68
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>278.085.000</b>	<b>236.014.258</b>	<b>84,87</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	264.235..000	224.924.258	85.12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.850.000	11.090.000	80.07
<b>B</b>	<b>Program Pengendalian Penduduk</b>	<b>133.356.000</b>	<b>130.022..656</b>	<b>97,50</b>
8	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>27.021.700</b>	<b>26.677.456</b>	<b>98,73</b>
	Dukungan Pelaksanaan Survei / Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	27.021.700	26.677..456	98,73
9	<b>Pemetaan perkiraan pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>106.334.300</b>	<b>103.345.200</b>	<b>97,19</b>
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	22.340.000	21.240.000	95,08
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.914..300	63.549..200	97.90
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	7.800.000	7.800.000	100
	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapan gan dan pelayanan KB	11.280.000	10.756.000	95,35
<b>C</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA</b>			
10	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi ( KIE ) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai</b>	<b>444.461.002</b>	<b>325.554.120</b>	<b>73,25</b>



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
1	2	3	4	5
	<b>Kearifan Budaya Lokal</b>			
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	80.000.000	35.625.000	44,53
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi ( KIE ) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	27.693.000	26.492.900	100
	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media Massa, cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruangan	149.992.800	82.710.150	55,14
	Pelaksanaan mekanisme operasional Program KKBPK melalui Rapat koordinasi Kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	26.000.000	26.000.000	100
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	131.900.202	131.376.070	99,60
	Pengendalian Program KKBPK	28.875.000	23.350.000	80,8
<b>11</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB ( PKB/PLKB)</b>	58.951.000	58.203.000	98,23
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh lapangan Keluarga Berencana ( PKB/PLKB)	9.513.000	9.274.000	97,49
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	49.438.000	48.929.000	98,97
<b>12</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	494.564.920	284.509.500	57,53
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	33.064.200	32.572.400	98,51
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	410.575.500	201.792.500	49,15

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
1	2	3	4	5
	Pembinaan Paska pelayanan bagi peserta KB	30.225.220	30.024.600	99,34
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	20.700.000	20.120.000	97,20
13	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	104.209.500	91.992.802	88,28
	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	48.709.800	40.457.802	83,06
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	55.499.700	51.525.000	92,86
<b>D</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	1.573.660.400	1.547.473.720	98,34
14	<b>Pelaksanaan Pembangunan Melalui Pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	1.312.749.600	1.310.085.220	99,80
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaann Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	428.884.000	427.985.500	99,79
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaann Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	30.282.900	29.566.300	97,63
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana ( Kader ) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaann Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	352.800.000	352.100.720	99,80
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaann Ekonomi	500.782.700	500.434.700	99,93

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
1	2	3	4	5
	Keluarga/ UPPKS)			
15	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	127.758.000	119.894.000	93,84
	Penguatan Kebijakan Daerah Dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaann Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	57.116.800	55.914700	97,902
	Pendayagunaan Mitra kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaann Ekonomi Keluarga/ UPPKS	76..036.000	60.579.000	80,99
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaann Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	127.758.000	119.894.000	93,84
	Jumlah	7.585.509.130	6.772.531.900	89,28

Dari tabel diatas tergambar dari 47 sub kegiatan terdapat 15 buah dengan realisasi dibawah 90%, dan terdapat 5 buah sub kegiatan dengan realisasi dibawah 60 % dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
1	2	3	4	5

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
1	2	3	4	5
1	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1.400.700	798.100	56,94
2	Fasilitasi Kunjungan Tanu	7.112.500	2.585.000	36,34
3	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	80.000.000	35.625.000	44,53
4	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media Massa, cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruangan	149.992.800	82.710.150	55,14
5	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	410.575.500	201.792.500	49,15

Penjelasan penyebab sisa anggaran sebagai berikut:

1. Pendataan dan penilaian administrasi kepegawaian, sisa dana berupa biaya makan minum rapat untuk penilaian angka kredit Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), karena pada tahun 2023 kewenangan penilaian angka kredit sepenuhnya oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kota hanya memberikan rekomendasi penilaian.
2. Fasilitasi Kunjungan Tamu, sisa dana berupa makan dan minum tamu sesuai dengan jumlah tamu yang dilayani.
3. Advokasi Program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja, sisa dana berupa transport masyarakat yang tidak bisa dibayarkan pada rapat koordinasi TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting), karena sebagian besar peserta berasal dari OPD (PNS), secara juknis DAK Non fisik tidak memungkinkan untuk dilakukan pergeseran dan perubahan anggaran
4. Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa, cetak dan elektronik serta media luar ruangan (DAK Non Fisik), sisa dana
  - Cetak baliho, spanduk dan biaya pemasangan baliho karena alokasi dana Dak Non fisik terlalu besar sesuai juknis dari BKKBN Pusat

- Jasa iklan bersama konten kreator ditambah pada perubahan anggaran untuk memaksimalkan promosi stunting, mengalami kesulitan menyesuaikan jadwal dengan kepala Daerah

5. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) , sisa dana disebabkan karena :

- Target MOW (Metode Operasi Wanita) yang terlalu tinggi oleh BKKBN Pusat yaitu 48 orang, dibandingkan dengan target 2022 yaitu 12 orang sehingga pencapaian MOW pada tahun 2023 hanya 35%. Disamping itu juga disebabkan karena kurangnya dukungan keluarga dalam memilih metode MOW.
- Target IUD pada tahun 2023 terlalu tinggi yaitu 437 orang, terealisasi sebanyak 137 akseptor dengan persentase capaian kinerja 32%, sedangkan pada tahun 2022 target IUD sebanyak 262 orang. Capaian IUD rendah karena masyarakat lebih banyak fanatik dengan metode implant dengan alasan tidak terlalu tinggi resiko dan efek samping

Walaupun serapan dana secara keseluruhan dibawah 90%, tetapi secara kinerja semua indikator yang diukur telah melebihi dari target yang ditetapkan, terutama indikator capaian TFR yang cukup rendah dari Nasional yaitu 1,85 yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan Program KB. Sisa dana sebagian besar berasal dari sub Kegiatan yang bersumber dari DAK Non Fisik dan efisiensi penggunaan anggaran untuk Dana Alokasi Umum (DAU).

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1.Kesimpulan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian Perjanjian kinerja kepala OPD berdasarkan indikator sasaran Renstra DPPKB 2021-2026. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi dalam mendukung pencapaian misi ke III Kepala Daerah yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

LAKIP Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok Tahun 2021 – 2026 berdasarkan capaian kinerja, pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dicapai sesuai dengan target, bahkan ada beberapa indikator yang melebihi target akhir masa RPJMD tahun 2026.

Dengan capaian TFR sangat rendah yaitu 1,85(dibawah target Nasional) menggambarkan telah berhasilnya pelaksanaan program KB di Kota Solok, Untuk masa yang akan datang prioritas program lebih dititiberatkan pada Pembangunan Keluarga untuk peningkatan SDM menyambut bonos demografi dengan tetap memantau akseptor KB yang sudah ada tidak Drop Out (DO)

Dengan tersusunnya LAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai tahun 2023 dan bermanfaat sebagai pedoman penentuan kebijakan/aspek strategis di tahun berikutnya.

## 4.2. Saran

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

- a. Diperlukan komitmen dan kerja sama dengan SKPD terkait dan stakeholder dalam upaya percepatan penurunan Stunting sebagai program Nasional.
- b. Diperlukan FGD bagi pengambil kebijakan untuk menyikapi strategi dan upaya yang diperlukan dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan capaian TFR 1,85.
- c. Diperlukan kajian oleh BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pengalokasian substansi kegiatan pada DAK Non Fisik agar tidak menimbulkan sisa dana yang terlalu besar.